

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG PENERAPAN HELM BERSTANDAR SNI DI KOTA SEMARANG

Oleh :

Rini Septiani, Margareth Suryaningsih, Dyah Lituhayu

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Purpose of this study ato determine whether there is communication or relationship between the government and the public on the implementing of law number 22 of 2009 on the application of SNI helmet standards in the city of Semarang. Used theory is the theory of Merilee S. Grindle, the study was designed and analyzed qualitatively deksriptif. Data collection was done by library research, observation, and in-depth interviews with a number of informants. Analysis used is deductive analysis, because the analysis of the data ini the study of the standard helmet SNI is taken based on the phenomenon that is being seen.

The result of this study indicate a lack of socialization is intensified by Satlantas Polrestabes to the community in the implementing of Semarang city law number 22 of 2009 on the application of ISO-Standards helmets in the city of Semarang. Implementing of the application program needs to aa a more effective from of activity in the socialization process. So that people can understand the purpose of the policy, and shape its program of activities must be done continuously.

It can be concluded that the standard helmet SNI policy implementing in the city of Semarang was considered quite good. But to get maximum result in its implementing, should be stepped up Satlantas Polrestabes continous dissemination to all the people in the city of Semarang.

Keywords : program imeplementation, dissemintation and attitude.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kecelakaan yang melibatkan sepeda motor dapat mengakibatkan pengendara atau penumpangnya mengalami luka parah, bahkan sampai meninggal dunia. Hal ini disebabkan salah satunya karena minimnya perlindungan para pengendara sepeda motor.

Bila dibandingkan dengan mobil, sepeda motor tidak memiliki instrumen peredam, sabuk keselamatan (*safety belt*) dan kantong udara (*air bag*) guna menahan benturan. Tidak dipungkiri bahwa sepeda motor memiliki keunggulan yaitu ukurannya yang lebih kecil dibandingkan mobil. Hal ini

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG PENERAPAN HELM BERSTANDAR SNI DI KOTA SEMARANG

Oleh :

Rini Septiani, Margareth Suryaningsih, Dyah Lituhayu

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Purpose of this study ato determine whether there is communication or relationship between the government and the public on the implementing of law number 22 of 2009 on the application of SNI helmet standards in the city of Semarang. Used theory is the theory of Merilee S. Grindle, the study was designed and analyzed qualitatively deksriptif. Data collection was done by library research, observation, and in-depth interviews with a number of informants. Analysis used is deductive analysis, because the analysis of the data ini the study of the standard helmet SNI is taken based on the phenomenon that is being seen.

The result of this study indicate a lack of socialization is intensified by Satlantas Polrestabes to the community in the implementing of Semarang city law number 22 of 2009 on the application of ISO-Standards helmets in the city of Semarang. Implementing of the application program needs to aa a more effective from of activity in the socialization process. So that people can understand the purpose of the policy, and shape its program of activities must be done continuously.

It can be concluded that the standard helmet SNI policy implementing in the city of Semarang was considered quite good. But to get maximum result in its implementing, should be stepped up Satlantas Polrestabes continous dissemination to all the people in the city of Semarang.

Keywords : program imeplementation, dissemintation and attitude.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kecelakaan yang melibatkan sepeda motor dapat mengakibatkan pengendara atau penumpangnya mengalami luka parah, bahkan sampai meninggal dunia. Hal ini disebabkan salah satunya karena minimnya perlindungan para pengendara sepeda motor.

Bila dibandingkan dengan mobil, sepeda motor tidak memiliki instrumen peredam, sabuk keselamatan (*safety belt*) dan kantong udara (*air bag*) guna menahan benturan. Tidak dipungkiri bahwa sepeda motor memiliki keunggulan yaitu ukurannya yang lebih kecil dibandingkan mobil. Hal ini

membuat pengendara menjadi mudah untuk melaju dan bergerak di keramaian lalu lintas, akan tetapi hal ini jugalah yang kemudian dapat membuat para pengendara sepeda motor mudah terlibat dkecelakaan yang dapat menyebabkan luka serius bagi pengendaranya.

Tingginya angka kecelakaan yang melibatkan sepeda motor ini disertai sejumlah fakta dari hasil penelitian di Indonesia yaitu satu dari tiga orang yang mengalami kecelakaan sepeda motor mengalami cedera di kepala. Dampak lebih lanjut dari cedera di kepala adalah dapat menyebabkan gangguan pada otak, pusat sistem syaraf dan urat syaraf tulang belakang bagian atas. Pengendara sepeda motor juga bisa mengalami gegar otak, cedera pada bagian kaki bahkan meninggal dunia. Untuk melindungi pengendara sepeda motor dari kecelakaan lalu lintas yang sering kali terjadi, pemerintah pun mewajibkan penggunaan helm SNI (Standar Nasional Indonesia) guna mengantisipasi kemungkinan yang lebih buruk. Penggunaan helm SNI diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 106 ayat 8.

Di dalam pasal ini dipersyaratkan bagi semua pengendara sepeda motor dan penumpangnya untuk memakai helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia.

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan tersebut maka dalam penelitian ini penulis mengangkat judul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penerapan Helm Standar SNI di Kota Semarang”**.

B. TUJUAN

1. Bagaimana proses pelaksanaan Undang – Undang No.22 tahun 2009 tentang Penerapan Helm berstandar SNI di Kota Semarang?
2. Apakah faktor penghambat Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Penerapan helm berstandar SNI di Kota Semarang?

C. TEORI

Peneliti menggunakan teori dari Merilee S.Grindle (Subarsono, 2005:93) dipengaruhi oleh dua variabel besar yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*contest of implementation*).

Variabel isi kebijakan mencakup:

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan;
2. Jenis manfaat yang diterima oleh *target groups*;
3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan;
4. Apakah sebuah program sudah tepat;
5. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci;
6. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Variabel lingkungan kebijakan mencakup:

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
2. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa;
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

II. Lokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah implementasi kebijakan Undang–Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang penggunaan helm berstandar SNI di Kota Semarang, sehingga lokus penelitian yang diambil dalam penelitian ini dipilih berdasarkan informasi yang diperoleh dan lokasi yang dijadikan sasaran dalam penelitian adalah Kota Semarang.

III. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini berasal dari pihak kepolisian dan masyarakat Kota Semarang yang berfungsi sebagai *key informan*. Berdasarkan teknik *sampling* yang dipilih oleh peneliti yaitu *snowballing sampling* maka penggalian informasi dimulai dari Kantor Polrestabes Kota Semarang yang menyediakan informasi paling dasar dan kompleks seputar bahan penelitian yang dibutuhkan.

A. METODE

I. Desain Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang dikemukakan tersebut di atas peneliti memilih menggunakan metode penelitian *kualitatif bersifat deskriptif*, dengan demikian data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Penelitian deskriptif juga bertujuan untuk memperoleh gambaran secara rinci mengenai keadaan obyek atau subyek amatan. Data yang diperoleh meliputi transkrip interview (wawancara), catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dan lain-lain.

Aplikasi metode kualitatif dalam penelitian ilmu-ilmu sosial dilakukan dengan langkah-langkah yaitu merumuskan masalah sebagai fokus penelitian, mengumpulkan data lapangan, menganalisis data, merumuskan hasil studi, dan menyusun rekomendasi untuk perbaikan kinerja dalam bidang ini.

II. Situs Penelitian

Situs penelitian ini adalah pada Puskesmas Rowosari. Alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah dikarenakan ada dugaan penurunan kualitas pelayanan di Puskesmas Rowosari dan mudahnya aksesibilitas, dimana lokasi penelitian mudah untuk keluar masuk bagi peneliti, dan memberikan peluang yang cukup karena

tidak mungkin hanya diteliti dalam sekali waktu saja.

III. Sumber Data

a) Data Primer

Data yang dikumpulkan secara langsung dari sampel dengan menggunakan data kuesioner dan wawancara yang diberikan pada sampel yang diteliti.

b) Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung, yakni dari berbagai sumber, misalnya buku, majalah yang dihubungkan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

IV. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menambah perolehan data-data, peneliti menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Interview atau wawancara
- b. Dokumentasi
- c. Studi kepustakaan

V. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis data yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu analisis data secara induktif. Maksudnya adalah bahwa pola-pola, tema-tema, dan kategorisasi bertumpu pada data yang ada, dan kesemuanya itu muncul dari data-data yang diperoleh. Peneliti untuk menganalisis data secara induktif dilakukan melalui penafsiran data. Penafsiran adalah mengolah informasi yang telah diperoleh dengan cara menyimpulkan perolehan data.

VI. Kualitas Data

Teknik untuk menguji keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan apakah proses dan hasil yang diperoleh sudah dipahami secara benar oleh peneliti berdasarkan apa yang dimaksudkan informan.

Cara yang dapat dilakukan antara lain :

1. Melakukan wawancara mendalam kepada informan.
2. Melakukan uji silang antara informasi yang diperoleh dari informan dengan hasil observasi di lapangan.
3. Mengkonfirmasi hasil yang diperoleh kepada informan dan sumber-sumber lain.

PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Implementasi Program Penerapan Helm Standar SNI ini, memiliki kelompok sasaran yaitu seluruh masyarakat Kota Semarang. Masyarakat Kota Semarang adalah masyarakat majemuk, yaitu terdiri dari berbagai macam budaya, adat, agama, tradisi, maupun norma. Segala aturan yang dibuat harus dapat mengatasi kemajemukan tersebut, sehingga penegakkan keadilan dapat terwujud. Suatu peraturan hukum dapat berfungsi dengan baik, apabila didukung oleh kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang mempunyai kesadaran akan keselamatan dalam berkendara sepeda motor, dengan sendirinya akan menggunakan helm yang memenuhi standar SNI tanpa paksaan. Pada kenyataannya, saat ini tingkat kesadaran masyarakat untuk menggunakan helm SNI masih kurang.

Manfaat yang dapat dirasakan masyarakat antara lain: dapat meningkatkan keamanan dan keselamatan saat berkendara di jalan raya, serta mengurangi tingginya resiko kecelakaan yang fatal bagi pengendara yang menggunakan helm SNI. Oleh karena itu, pengguna jalan yang mengendarai sepeda motor wajib menggunakan helm sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Satlantas Polrestabes Kota Semarang di dalam beberapa tahun terakhir ini, sedang gencar mengadakan sosialisasi-sosialisasi

kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan helm ber-SNI. Sosialisasi yang dilakukan berupa pemberian pamflet, menyampaikan informasi lewat media elektronik atau radio, mendatangi wilayah disekitar kota, mendatangi sekolah-sekolah, serta mendindak secara tegas bagi pengendara sepeda motor yang melanggar aturan lalu lintas. Pada kenyataannya, proses sosialisasi masih terdapat banyak kendala.

Usaha dari pihak kepolisian untuk menerapkan peraturan lalu lintas yang mewajibkan pengendara bermotor untuk memakai helm yang berstandar SNI, tidak didukung oleh kondisi masyarakat yang cenderung melalaikan peraturan tersebut.

Terkait dengan pelaksanaan kebijakan, staf atau pelaksana kebijakan mempunyai tugas utama, yaitu mengimplementasikan kebijakan kepada kelompok sasaran (*target group*), yaitu seluruh masyarakat Kota Semarang. Seorang pelaksana kebijakan harus aktif di dalam bekerja dan melayani masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat dapat memahami secara jelas tujuan dari kebijakan penerapan helm berstandar SNI.

Di dalam pelaksanaannya, proses sosialisasi yang digencarkan oleh pihak kepolisian Satlantas Polrestabes Semarang masih berupa penyampaian informasi melalui media elektronik atau radio. Sekarang ini, juga digunakan alat-alat penguat suara (*speaker*) yang dipasang disetiap lampu merah. Selain itu, pihak kepolisian juga memberikan sosialisasi secara langsung terhadap masyarakat dengan mendatangi daerah disekitar Kota Semarang, aparat kepolisian membagikan pamflet mengenai peraturan dan tata tertib dalam berkendara di jalan raya.

Satlantas Polrestabes Kota Semarang memberikan informasi kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi

tentang informasi mengenai peraturan wajib memakai helm berstandar SNI.

Kejelasan komunikasi ini meliputi pengiriman informasi antara sesama pihak kepolisian Satlantas Polrestabes, dan antara pihak kepolisian Satlantas Polrestabes dengan masyarakat Kota Semarang.

Sosialisasi Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penerapan Helm Berstandar SNI, merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan program penerapan, yang dapat dilakukan melalui berbagai cara yang paling efektif.

Program penerapan helm berstandar SNI adalah salah satu upaya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pengguna kendaraan sepeda motor. Program tersebut dengan mewajibkan pengendara menggunakan helm sesuai dengan standar keselamatan.

B. ANALISIS

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penerapan Helm Berstandar SNI di Kota Semarang, dibentuk atas dasar Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, dan kelancaran masyarakat pada saat berkendara di jalan raya, khususnya masyarakat Kota Semarang. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk menggunakan helm berstandar SNI, maka tingkat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas pun akan menurun. Kebijakan ini sudah dilakukan sesuai dengan prosedur, namun masih belum berhasil menurunkan tingkat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang. Hal tersebut belum sesuai dengan target yang diinginkan oleh Satlantas Polrestabes Semarang, yaitu harus ada penurunan jumlah pelanggaran dan

kecelakaan lalu lintas setiap bulannya. Masyarakat diwajibkan untuk mentaati peraturan yang telah ditetapkan, agar dapat merasakan manfaat dari peraturan tersebut, yaitu terhindar dari pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Penerapan Helm Berstandar SNI di Kota Semarang ini, dapat dilihat berdasarkan pemaparan berikut:

1. Kelompok Sasaran

Di dalam pelaksanaan program penerapan helm berstandar SNI di Kota Semarang, Satlantas Polrestabes Kota Semarang telah memprioritaskan penerapan melakukan koordinasi yang tepat dengan seluruh jajaran kepolisian Kota Semarang, dalam hal ini adalah Polrestabes dan seluruh polsek di Kota Semarang. Polsek sebagai satuan kepolisian bagian terbawah yang dapat mengoptimalkan program penerapan helm berstandar SNI diseluruh wilayah Kota Semarang. Koordinasi antara Satlantas Polrestabes dengan seluruh polsek di Kota Semarang dilakukan guna mencapai standarisasi kebijakan program penerapan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu mewajibkan seluruh pengguna jalan, khususnya pengguna kendaraan roda dua untuk memakai helm sesuai dengan standar SNI.

2. Manfaat Yang Diperoleh

Program penerapan helm berstandar SNI mempunyai manfaat yang sangat besar. Manfaat yang dirasakan masyarakat antara lain, dapat meningkatkan keamanan dan keselamatan pada saat berkendara di jalan raya dan dapat mengurangi tingginya resiko kecelakaan yang fatal bagi pengendara yang menggunakan helm SNI. Pengendara sepeda

motore dihimbau agar selalu menggunakan helm sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan dari program penerapan helm berstandar SNI ini belum maksimal, karena dalam pelaksanaannya mengalami berbagai macam kendala seperti, masyarakat daerah pinggiran masih belum memahami tujuan dari penerapan kebijakan tersebut. Banyak terjadi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di daerah pinggiran di Kota Semarang.

4. Pelaksanaan Program

Proses pelaksanaannya terdiri dari peningkatan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Polrestabes Kota Semarang untuk menunjang proses kegiatan sosialisasinya. Sarana dan prasarana yang disediakan seperti pemasangan alat-alat penguat suara disetiap lampu merah, pemasangan spanduk, pembagian brosur tentang cara menggunakan helm (langsung kepada pengendara sepeda motor), serta penyampaian informasi melalui media massa. Pelaksanaan program penerapan helm berstandar SNI ini diperlukan untuk menambah bentuk kegiatan yang lebih efektif di dalam proses sosialisasinya. Agar masyarakat dapat memahami tujuan dari kebijakan tersebut, dan bentuk kegiatan programnya pun harus dilakukan secara terus menerus.

5. Sumber Daya

Terkait dengan pelaksanaan kebijakan, aktor pelaksana kebijakan mempunyai tugas utama yaitu mengimplementasikan kebijakan kepada kelompok sasaran yang tidak lain adalah seluruh masyarakat Kota Semarang. Seorang pelaksana kebijakan harus aktif memberikan dan melayani. Diharapkan masyarakat dapat memahami secara jelas dan mendapatkan

manfaat setelah mengikuti kebijakan tersebut.

Sarana dan prasarana merupakan alat penunjang di dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Mengenai kelengkapan maupun kualitas dan kuantitasnya harus diperhatikan sesuai dengan kebutuhan program kebijakan. Apabila hal tersebut mampu tersedia dengan baik, setidaknya lebih memudahkan aktor pelaksana dalam mencapai tujuan kebijakannya.

6. Komunikasi

Di dalam melaksanakan penerapan helm berstandar SNI di Kota Semarang, pihak Satlantas Polrestabes Semarang melakukan komunikasi dengan memberikan informasi kepada masyarakat melalui media massa dan radio, pembagian brosur atau pamflet secara gratis kepada pengendara sepeda motor, sosialisasi secara langsung ke sejumlah daerah, dan pemasangan alat penguat suara disetiap lampu merah yang memberikan informasi mengenai peraturan lalu lintas. Khususnya peraturan yang mewajibkan memakai helm berstandar SNI.

Indikator kejelasan komunikasi ini juga penting guna menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan lancar bila komunikasi berjalan dengan baik. Selain itu kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, jelas dan konsisten. Kejelasan komunikasi ini meliputi pengiriman informasi antara Polrestabes dengan Satlantas, serta antara Satlantas dengan masyarakat.

7. Sosialisasi Program

pada pelaksanaannya masih banyak masyarakat kurang memahami maksud dari pemerintah menerapkan kewajiban menggunakan helm yang sesuai dengan standar keselamatan ini. Dengan demikian, angka pelanggaran lalu lintas akan meningkat semakin tinggi. Kepatuhan pengemudi terhadap ketentuan untuk menggunakan helm SNI, pada umumnya tidak lebih dari upaya untuk menghindari dari pihak aparat kepolisian. Sementara nilai filosofis dari ketentuan tersebut bukan merupakan penggerak kesadaran diri untuk menggunakan helm yang berstandar SNI.

8. Respon Masyarakat

Program penerapan helm berstandar SNI ini pada pelaksanaannya belum berjalan dengan lancar karena masih banyak masyarakat belum memahami tentang tujuan dari program tersebut. Masyarakat sebagai kelompok sasaran dalam program penerapan helm berstandar SNI, berpendapat bahwa program ini hanya menguntungkan sekelompok pihak saja, yakni para pengusaha helm dan sudah barang tentu aparat kepolisian yang akan banyak melakukan tilang.

Pada dasarnya masyarakat sebagai *target groups* mendukung peraturan kebijakan ini. Didalam pelaksanaannya masih belum berjalan maksimal, sehingga masih banyak masyarakat belum memahami tujuan dari program penerapan ini. Selain itu, sanksi yang relatif tinggi untuk pelaku pelanggaran berupa tidak menggunakan helm yang sesuai dengan standar keselamatan, menjadikan banyak masyarakat khususnya pengguna kendaraan sepeda motor merasakan terlalu berat sanksi denda yang diterapkan. Diharapkan pada pelaksanaan selanjutnya, aparat kepolisian harus lebih bekerja keras, agar masyarakat dapat memahami tujuan dari program penerapan helm berstandar SNI ini. Kesadaran hukum masyarakat perlu

dipupuk dan dikembangkan melalui pola pembinaan yang lebih efektif dan intensif.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Proses pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penerapan Helm Berstandar SNI di Kota Semarang ini, kelompok sasarannya adalah seluruh masyarakat Kota Semarang. Di dalam pelaksanaan kebijakannya, yang bertindak sebagai implementor, evaluator dan pengawas adalah Satlantas Polrestabes. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penerapan Helm Berstandar SNI sudah dilakukan, Proses pelaksanaannya terdiri dari peningkatan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Polrestabes Kota Semarang untuk menunjang proses kegiatan sosialisasinya.

Faktor yang menghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penerapan Helm Berstandar SNI di Kota Semarang antara lain, usaha dari pihak kepolisian untuk menerapkan peraturan lalu lintas yang mewajibkan pengendara bermotor memakai helm berstandar SNI. Tidak didukung oleh kondisi masyarakat yang cenderung melalaikan peraturan tersebut. Di dalam pelaksanaan program penerapan helm berstandar SNI di Kota Semarang sampai tahun 2012, menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran lalu lintas masih belum menurun. Diperoleh data bahwa terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas disekitar daerah pinggiran Kota Semarang, yaitu sebanyak 1049 pelanggaran lalu lintas. Dibanding tahun 2011, yang hanya mencapai 484 pelanggaran lalu lintas, adanya peningkatan jumlah pelanggaran dan

kecelakaan lalu lintas tersebut sebagai salah satu indikator bahwa belum berhasilnya implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penerapan Helm Berstandar SNI, sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

B. SARAN

Ada beberapa saran yang bertujuan untuk membantu pihak kepolisian di dalam melaksanakan Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penerapan Helm Berstandar SNI di Kota Semarang yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penerapan Helm Berstandar SNI dalam proses sosialisasinya harus lebih digencarkan oleh pihak Satlantas Polrestabes kota Semarang. Memberikan penyuluhan-penyuluhan keseluruh wilayah Kota Semarang, memberikan informasi seputar peraturan lalu lintas khususnya peraturan yang mewajibkan masyarakat untuk memakai helm berstandar SNI.
2. Koordinasi dan konsistensi dari masing-masing anggota kepolisian harus lebih ditingkatkan, agar pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penerapan Helm Berstandar SNI dapat berjalan maksimal sesuai dengan tujuan yang diinginkan yaitu mengurangi tingkat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Memahami Dasar-Dasar Kebijakan*. Jakarta: Untirta Press
- Fadillah, Putra. 2002. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Indrawijaya, Adam. 2000. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Indiahono, Dwiyanto Agus. 2009. *Kebijakan Publik: berbasis dynamic policy analisis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Islamy, Irfan M. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nusa, Jelajah. 2010. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bogor : Suluh Media.
- Nugroho, Riant. 2003. *Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES
- Wahab, Solichin Abdul. 2002. *Analisis Kebijaksanaan : dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori & Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

